



Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pricelia Maharani Suwu*, Ikang Murapi, Layali Ihyani

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Sarjana Akuntansi, Universitas Bumigora
Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*Korespondensi: Sellysuwu1407@gmail.com

Article history:

Received: 28/07/2025
Revised: 31/07/2025
Accepted: 11/08/2025
Published: 11/08/2025

Keywords:

Accountability of Village Fund Management, Internal Control System, Role of Village Apparatus, Transparency

Abstract

The government has currently distributed village funds to every village in Indonesia. Good management of village funds can certainly help a village develop. This study aims to examine and analyze the influence of the role of village officials, transparency, and internal control systems on the accountability of village fund management. A quantitative approach was used through the distribution of questionnaires to village secretaries, village councils, and village communities in Lingsar Subdistrict, West Lombok Regency, with a total of 39 respondents. The results of the study indicate that the internal control system variable influences the accountability of village fund management. However, the variables of the role of village officials and transparency do not influence the accountability of village fund management in Lingsar Sub-district, West Lombok Regency. This finding indicates that the effectiveness of accountability is more determined by the strength of the internal control system than by the role of village officials or transparency.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi

Abstrak

Pemerintah saat ini telah menyalurkan dana desa kepada setiap desa di Indonesia. Pengelolaan dana desa yang baik tentunya dapat membuat suatu desa menjadi berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada sekretaris desa, BPD Desa, dan masyarakat desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan total 39 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, variabel peran perangkat desa dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas akuntabilitas lebih ditentukan oleh kekuatan sistem pengendalian internal dibandingkan peran perangkat desa maupun transparansi.

©2025 Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)

This is an open access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah desa dan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengalokasikan dana desa kepada seluruh desa di tanah air. Kebijakan ini terus diperkuat pada masa pemerintahan tahun 2014-2024, yang secara progresif meningkatkan anggaran transfer ke daerah, termasuk dana desa, dari tahun ke tahun (Dewi et al., 2024).

Pengelolaan dana desa yang baik tentunya dapat membuat suatu desa menjadi berkembang. Pengelolaan dana desa di kecamatan lingsar masih mempunyai kekurangan dalam akses laporan keuangan,

Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pricelia Maharani Suwu, Ikang Murapi, Layali Ihyani

ini buktikan bahwa tidak semua desa di kecamatan lingsar dapat mengakses laporan keuangan di website desa hal tersebut dibutuhkan agar penggunaannya bisa dipantau warga desa, tepat sasaran dan bisa berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Dana desa merupakan perpanjangan dari pemerintah untuk mesenjahterakan desa-desa yang ada di Indonesia.

Pemerintah Pusat menetapkan alokasi dana desa untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 sebesar Rp1.118.836.885.024. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp. 25.577.489.024 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp1.093.259.396.000. Sebelumnya, pada tahun 2021, alokasi dana desa untuk NTB mencapai Rp1.247.727.848.000, namun mengalami penurunan sebesar 4 persen dalam dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi Rp1.194.497.788.000 pada 2022 dan kembali turun pada 2023. Tren ini kemudian berbalik arah di tahun 2024 dengan peningkatan sebesar kurang lebih 2 persen dari tahun sebelumnya. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kebijakan fiskal pusat dalam mendukung pembangunan desa di NTB (Radarlombok.co.id).

Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara (DJPb) NTB melaporkan, penyaluran alokasi Dana Desa (DD) tahun 2024. Kabupaten Lombok Barat mendapatkan dengan total pagu Rp. 142,08 miliar (ntbsatu.com). Dana desa Lombok Barat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 109.900.086.000 (Lombok.tribunnews.com). Kecamatan Lingsar mendapat pagu sebesar Rp. 17.454.368.000 (Nurhidayati, 2024).

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seorang kepala desa beserta perangkatnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya kepada pihak yang memiliki otoritas dan hak untuk menerima laporan tersebut, yaitu pemberi amanah (principal). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas mencakup penyampaian laporan secara transparan dan berkala mengenai pelaksanaan tugas serta kebijakan yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif (Setiana & Yuliani, 2017).

Penelitian ini berlandaskan pada teori stewardship sebagai grand theory. Teori ini berpandangan bahwa individu yang diberi tanggung jawab—dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya—secara alami terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan integritas, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks penelitian ini, teori stewardship menjelaskan hubungan antara masyarakat desa sebagai principal yang memberikan kepercayaan, dan pemerintah desa sebagai steward yang bertugas mengelola dana desa. Kepercayaan tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, guna mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Surifah & Rofiqoh, 2020, p. 169).

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen, dan lokasi penelitian yaitu penelitian yang difokuskan pada Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, memberikan kontribusi kontekstual yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis p.engaru.h p.era.n perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Motivasi dan alasan dilakukannya penelitian ini yaitu pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 1.118.836.885.024, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat sebesar Rp. 25.577.489.024.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peran aktif perangkat desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa memegang peranan krusial dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Dalam konteks ini, perangkat desa bukan hanya sebagai pelaksana administratif semata, melainkan juga sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang ada demi kepentingan masyarakat desa. Semakin efektif dan konsisten perangkat desa menjalankan tugasnya, maka akan semakin terbuka peluang terciptanya mekanisme pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori stewardship yang menganggap perangkat desa sebagai steward—individu yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berintegritas. Penelitian Mumu et al. (2023) membuktikan bahwa peran

perangkat desa berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Selain itu, penelitian Ningsih et al. (2022) juga menyatakan bahwa variabel peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H1: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kerangka teori *stewardship*, transparansi mencerminkan manifestasi nyata dari sikap tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang *steward*, yakni perangkat desa, dalam mengelola sumber daya dan kebijakan desa. Keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perangkat desa tidak hanya menunjukkan kesungguhan dalam mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengelolaan dana desa, tetapi juga mengindikasikan tingkat loyalitas dan komitmen mereka terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemilik amanah. Dengan adanya transparansi, masyarakat sebagai *principal* memiliki kesempatan untuk melakukan kontrol sosial yang efektif, sehingga tercipta mekanisme pengawasan yang mampu meminimalisir praktik-praktik penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *stewardship*. Penelitian Suryani & Hidayat (2023) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Selain itu, penelitian Fajri et al. (2021) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kerangka teori *stewardship*, sistem pengendalian internal (SPI) dipahami bukan sebagai mekanisme kontrol yang didasari oleh kecurigaan terhadap pengelola atau *steward*, melainkan sebagai instrumen pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan tugas *steward* secara lebih efektif dan bertanggung jawab. SPI berfungsi sebagai alat yang memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa dengan menekankan pada kepentingan bersama atau kolektif. Melalui penerapan SPI yang optimal, perangkat desa sebagai *steward* dapat memperkuat komitmen moral dan profesionalisme mereka, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pengelolaan dana publik berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan demikian, SPI menjadi pilar penting dalam mewujudkan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan etis *steward* terhadap komunitas yang dilayaninya. Penelitian Pratamayasa et al. (2024) membuktikan bahwa variabel *sistem pengendalian internal* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian Adeyemi & Olarewaju (2019) juga menyatakan bahwa *sistem pengendalian internal* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masyarakat sektor publik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

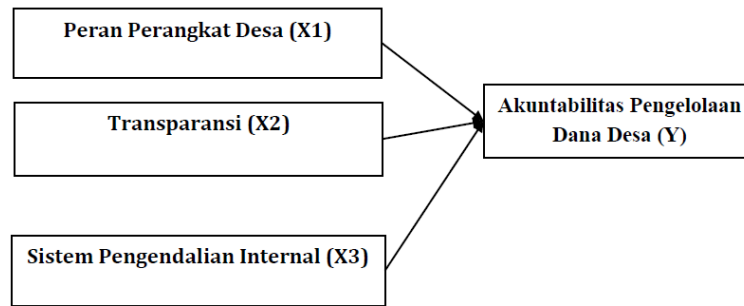
H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

METODE

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa dari 13 kantor desa yang berada di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Model penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel independen pada penelitian ini yaitu peran perangkat desa (X1), transparansi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3). Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Pengujian hipotesis, penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda dan uji t secara parsial.

Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pricelia Maharani Suwu, Ikang Murapi, Layali Ihyani



Gambar 1
Kerangka penelitian

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di 13 desa yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Lokasi penelitian dipilih untuk memperoleh gambaran yang representatif terkait pengelolaan dana desa pada wilayah tersebut. 13 desa yang diteliti tersebut terdiri dari Desa Lingsar, Batu Kumbang, Sigorongan, Duman, Karang Bayan, Langko, Geria, Peteluan Indah, Batu Mekar, Giri Madia, Gegelang, Saribaya, dan Gontoran.

Statistik Deskriptif

Langkah awal terlebih dahulu pengujian statistik deskriptif dalam data yang akan dianalisis. Statistik deskriptif adalah cara menyajikan data dengan menunjukkan nilai min, max, rata-rata (mean), dan standard deviasi dari setiap variabel ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana D.esa (Y)	39	33,00	40,00	36,4615	2,08814
Peran Perangkat Desa (X1)	39	33,00	40,00	36,6154	2,07257
Transparansi (X2)	39	33,00	40,00	38,9231	1,34526
Sistem Pengendalian Internal (X3)	39	61,00	74,00	67,2821	4,44848
Valid N (listwise)	39				

Merujuk hasil yang ditampilkan pada Tabel 1 variabel peran perangkat desa mencatat nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata nilai peran perangkat desa sebesar 36,6154 dengan standar deviasi 2,07257. Angka rata-rata yang mendekati nilai maksimum tersebut mengindikasikan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa termasuk dalam kategori tinggi. Meski demikian, nilai standar deviasi yang tercatat menunjukkan tingkat penyebaran data yang sedang, menandakan adanya variasi persepsi antar responden mengenai intensitas dan efektivitas peran perangkat desa.

Merujuk pada data dalam Tabel 1, variabel transparansi mencatat nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata skor transparansi yang diperoleh adalah 38,9231 dengan standar deviasi sebesar 1,34526. Rata-rata yang mendekati nilai maksimum ini menunjukkan bahwa tingkat

transparansi dalam pengelolaan dana desa relatif tinggi. Selain itu, besaran standar deviasi yang kecil mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai transparansi cukup konsisten dan homogen, yang berarti terdapat sedikit variasi dalam penilaian para responden terkait aspek tersebut.

Pada tabel 1, sistem pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 61, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 74. Rata-rata sistem pengendalian internal sebesar 67,2821 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,44848. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sistem pengendalian internal relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum, sedangkan varian data relatif besar dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi.

Pada tabel 1, akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai minimum sebesar 33, sedangkan nilai maksimum sebesar 40. Rata-rata variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 36,4615 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,08814. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum, sedangkan varian data relatif besar dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi.

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

		B	Std. Error	Beta	t	Sig
1	(Constant)	28,072	12,156		2,309	0,027
	X1	0,000	0,184	0,000	-0,001	0,999
	X2	-0,200	0,259	-0,129	-0,773	0,444
	X3	0,241	0,111	0,397	2,177	0,036

Model regresi linear penelitian dapat dilihat dari unstandardized coefficients kolom beta pada tabel 2. Berdasarkan hasil analisis tersebut di peroleh nilai konstanta sebesar 28,072. Nilai variabel X1 menghasilkan angka sebesar 0,000, variabel X2 sebesar -0,200, dan variabel X3 sebesar 0,241 sehingga dapat dijadikan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 28,072 + 0,000X1 - 0,200X2 + 0,241X3 + e$$

Uji T (Parsial)

Mengacu pada Tabel 2, nilai t hitung untuk variabel peran perangkat desa dan transparansi berada di bawah nilai t. tabel sebesar 2,03224. Di samping itu, nilai signifikansi menunjukkan angka yang jauh di atas tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama. (H_1) dan hipotesis kedua (H_2) tidak dapat diterima, yang mengindikasikan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel sistem p.engendalian inte.rnal memperoleh nilai t hitung melebihi nilai t tabel sebesar 2,03224. Namun, nilai sig.nifikansi tercatat lebih rendah dari ambang batas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima sehingga memiliki pengaruh secara parsial. terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana. desa.

PEMBAHASAN

Mengacu pada tabel 2 pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai t hitung variabel peran perangkat desa sebesar -0,01 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,03224 sehingga t hitung < t tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,999 di mana dalam hal ini nilai sig. lebih besar dari 0,05 atau 0,999 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diidentifikasi bahwa H1 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini berlawanan dengan dugaan awal yang mengasumsikan bahwa peran aktif perangkat desa memiliki kontribusi positif terhadap akuntabilitas. Artinya, meskipun perangkat desa secara struktural terlibat dalam tata kelola pemerintahan desa, keberadaannya belum secara efektif mendorong terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian Ningsih *et al.* (2022) juga menyatakan bahwa. bahwa. variabel peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pricelia Maharani Suwu, Ikang Murapi, Layali Ihyani

Hasil pada Tabel 2, transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai t hitung variabel transparansi sebesar $-0,773$ sedangkan nilai t tabel sebesar $2,03224$ sehingga t hitung $< t$ tabel dan tingkat signifikansi sebesar $0,444$ di mana dalam hal ini nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$ atau $0,444 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat diidentifikasi bahwa H_2 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini tidak sejalan dengan dugaan awal penelitian yang memperkirakan adanya hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa secara persepsi, aparatur desa dinilai kurang transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan tidak dapat diakses secara online sehingga transparansi aparatur desa dinilai belum cukup berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat baik itu secara online ataupun secara langsung di kantor desa. Selain itu, perlu strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar transparansi yang telah dilakukan dapat benar-benar dipahami dan dimanfaatkan. Selain itu, hasil penelitian Fitri & Arza (2023) sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa transparansi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan data dalam Tabel 2, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung sebesar $2,177$, yang melampaui nilai t tabel sebesar $2,03224$. Di sisi lain, tingkat signifikansinya sebesar $0,036$, berada di bawah ambang batas $0,05$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima, yang berarti bahwa secara statistik, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini mendukung asumsi awal penelitian, yakni bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dapat memperkuat praktik pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeyemi & Olarewaju (2019) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masyarakat sektor.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut belum mampu mendorong terciptanya tata kelola yang akuntabel, sehingga hipotesis H_1 dan H_2 ditolak. Sebaliknya, sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian internal yang berjalan secara efektif berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis H_3 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, F. K., & Olarewaju, O. M. (2019). Internal control system and financial accountability: An investigation of Nigerian South-Western public sector. *AUDCE*, *15*(1), 134–150.
- Dewi, N. K. M. E., Yogantara, K. K., & Asana, G. H. S. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, peran perangkat desa dan sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubutambahan. *Journal of Social Science Research*, *4*(2), 8256–8269.
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, *17*(2), 209–227.
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh transparansi, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *5*(3), 1115–1126.
- Mumu, O., Pangkey, R., & Tangkau, J. (2023). Pengaruh peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, *1*(4), 78–87.

- Ningsih, U. S., Diana, N., & Junaidi. (2022). Peran perangkat desa dan kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2021. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 11(5), 10–20.
- Pratamayasa, D. P., Murapi, I., & Ajiani, I. P. F. (2024). Pengaruh budaya organisasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 18–32.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *University Research Colloquium*, 205–210.
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kompetensi aparatur terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal pada desa di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 228–247.